



EDITOR :
M. Zaenal Arifin Anis
Heri Susanto

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Implementasi Kurikulum 2013 dan Aktualisasi
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam
Upaya Memantapkan Insan Berkarakter



**Himpunan Sarjana Pendidikan
Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Bekerjasama Dengan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan,
Program Pasca Sarjana Pendidikan IPS
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR -- iii

DAFTAR ISI -- v

BAGIAN I: KURIKULUM IPS, DAN JATIDIRI BANGSA

Aktualisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Memantapkan Insan Berkarakter: Menyongsong Implementasi Kurikulum 2013 -- 2

Udin S. Winataputra

Implementasi Perubahan Kurikulum 2013 Berasaskan pada Pemenuhan Hak Asasi Pendidikan -- 17

Harpani Matnuh

Social Studies di Beberapa Negara -- 24

Suswandari

Kurikulum 2013 dan Pembelajaran Bahasa yang Berkarakter di PIPS -- 34

Moh. Yamin

Posisi Geografi pada Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran IPS Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs). -- 42

Ketut Prasetyo

Obyek Sejarah, Jatidiri Bangsa dan Ketahanan Nasional -- 60

M. Zaenal Arifin Anis

BAGIAN II: PENDIDIKAN IPS DAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Sebagai Pendidikan Karakter -- 68

Herry Porda Nugroho Putro

Pembaharuan Pendidikan IPS dengan Mengadopsi Ajaran dan Metode Guru Sekumpul -- 76

Ersis Warmansyah Abbas

Pendidikan IPS dan Pendidikan Karakter: Konsep, Implementasi dan Solusi -- 91

Syahrudin

Pendidikan IPS dan Solusi Menyelesaikan Persoalan Sosial -- 103

Lelly Qodariah

Dekonstruksi Pendidikan Ilmu Sosial Melalui Pendekatan Cross Discipline untuk Pendidikan Bermakna -- 110

Supardi

Mengikis Kekerasan di Sekolah Melalui Pendidikan Berkonsep Cinta -- 117

Fatchul Mu'in

Pengintegrasian Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran IPS di SMP -- 125

Endang Mulyani

Pengaruh Latar Belakang Orang Tua Terhadap Kemandirian Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi

FKIP-Unlam Banjarmasin -- 136

Sri Setiti

BAGIAN III: GURU IPS, DAN REVITALISASI PEMBELAJARAN IPS

Strategi Penyiapan Guru IPS yang Berkarakter -- 144

Wahyu

Karakter Guru IPS Berwawasan Lingkungan yang Cerdas Membantu Percepatan Keberhasilan Pembelajaran di Kelas -- 155

Acep Supriadi

Gagasan Pembelajaran IPS Berkarakter untuk Kelompok Belajar (Kejar) Paket B (Studi di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM Barito Banjarmasin) -- 162

Rochgiyanti

Pembelajaran IPS Berbasis Multikulturalisme dalam Membentuk Karakter Kebangsaan -- 172

Heri Susanto

Menumbuhkan Sikap *Mendem Jero Mikul Duwur* Melalui Pembelajaran IPS

(Suatu Kajian Pendidikan Nilai Berbasis Kearifan Lokal Budaya Jawa) -- 178

Anwar Senen

GAGASAN PEMBELAJARAN IPS BERKARAKTER UNTUK KELOMPOK BELAJAR (KEJAR) PAKET B (Studi di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM Barito Banjarmasin)

Oleh:

Rochgiyanti

Staf Pengajar Pada Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unlam Banjarmasin

Abstrak:

PKBM merupakan salah satu lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan, yang minimal mempunyai sekurang-kurangnya tiga program pendidikan. Sebagai salah satu penyelenggara program Kejar Paket B, PKBM harus melaksanakan pembelajaran dengan tetap mengacu pada standar proses yang berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan, yang meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Dengan memperhatikan keterampilan yang telah dimiliki oleh warga belajar, lembaga PKBM bisa mencoba mensinergikannya dengan pendidikan kecakapan hidup, karena salah satu nilai yang diajarkan dalam pendidikan bagi orang dewasa adalah nilai kemandirian.

A. Latar Belakang

Semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan, sebagaimana tercantum dalam undang-undang. Kewajiban negara adalah menyelenggarakan pelaksanaan pendidikan, baik melalui jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Keberadaan pendidikan formal, nonformal, dan informal dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 26 dijelaskan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Termasuk dalam pendidikan nonformal, salah satunya adalah pendidikan kesetaraan Paket A (setara SD/ sederajat), Paket B (setara SMP/ sederajat), dan Paket C (setara SMA/ sederajat).

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Salah satu satuan pendidikan nonformal yang boleh menyelenggarakan pendidikan kesetaraan adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

PKBM merupakan salah satu lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan, yang minimal mempunyai sekurang-kurangnya tiga program pendidikan. PKBM ikut berperan penting dalam mensukseskan program wajib belajar, yang merupakan program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

Sebagai salah satu penyelenggara program Kejar Paket B, PKBM harus melaksanakan pembelajaran dengan tetap mengacu pada standar proses yang berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan

pendidikan, yang meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Dari hasil penelitian yang dilakukan di PKBM Barito Banjarmasin, pelaksanaan pembelajaran IPS masih mengalami beberapa permasalahan, seperti minimnya waktu dan frekuensi tatap muka, kehadiran warga belajar dan tutor sangat kurang, minimnya perencanaan pembelajaran, metode pembelajaran yang lebih banyak didominasi ceramah, minimnya evaluasi pembelajaran, dll. Berpijak pada berbagai permasalahan tersebut maka muncul gagasan tentang pembelajaran IPS yang berkarakter bagi kelompok belajar (Kejar Paket B di PKBM Barito Banjarmasin).

B. Kajian Pustaka

1. Pembelajaran IPS

Pembelajaran (*learning*) merupakan suatu situasi dimana guru berupaya mengorganisasikan lingkungan terjadinya pembelajaran. Pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi antara peserta belajar dengan pengajar/instruktur dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk pencapaian tujuan belajar tertentu (Uno, 2009:54).

Terdapat banyak rumusan mengenai pembelajaran dengan berbagai implikasinya, oleh Hamalik (2010:58-65) dirangkum sebagai berikut :

- a. Pembelajaran adalah upaya mengorganisasi lingkungan untuk menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik. Rumusan ini lebih menitikberatkan pada unsur peserta didik, lingkungan, dan proses belajar.
- b. Pembelajaran adalah upaya mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga masyarakat yang baik. Rumusan ini berorientasi kepada kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
- c. Pembelajaran adalah suatu proses membantu siswa menghadapi kehidupan masyarakat sehari-hari. Rumusan ini berorientasi pada kehidupan masyarakat.

Selanjutnya Hamalik (2010:66) menyatakan bahwa ada tiga ciri khas yang terkandung dalam sistem pembelajaran, yaitu :

- a. Rencana, yaitu penataan ketenagaan, material, dan prosedur, yang merupakan unsur-unsur sistem pembelajaran, dalam suatu rencana khusus.
- b. Saling ketergantungan (*interdependence*) antara unsur-unsur sistem pembelajaran yang serasi dalam suatu keseluruhan.,
- c. Tujuan, sistem pembelajaran mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai, yaitu agar siswa belajar.

Dalam sistem pembelajaran terdapat unsur-unsur minimal yang harus terpenuhi yaitu peserta didik, suatu tujuan, dan suatu prosedur kerja untuk mencapai tujuan. Tujuan pembelajaran mengacu pada kurikulum. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 37 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat Ilmu Pengetahuan Sosial. Istilah IPS merupakan padanan dari *Social Studies* dalam konteks kurikulum di Amerika Serikat. Somantri (Sapriya, 2009:11) mendefinisikan Pendidikan IPS untuk persekolahan sebagai penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan.

Fokus kajian utama Pendidikan IPS adalah interaksi dalam masyarakat. Selanjutnya Wahab (Gunawan, 2011:16) mengemukakan bahwa :

'Studi sosial atau IPS adalah tentang manusia. Tidak ada bagian dari kurikulum yang amat memperhatikan masalah hubungan manusia selain studi sosial atau IPS, yang memang dirancang untuk membantu kita semua memahami baik diri kita sendiri maupun orang lain dimulai dari lingkungan keluarga, tetangga sampai pada mereka yang hidup nun jauh di sebagian dari lingkaran dunia'.

Pada dasarnya tujuan utama dari pembelajaran IPS menurut Banks (1990:4) adalah : (1) *knowledge*, (2) *skills*, (3) *attitudes and values*, and (4) *citizen action*. Menurut Kosasih (Solihatin, 2009:15) Pendidikan IPS berusaha membantu peserta didik dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi sehingga akan menjadikannya semakin mengerti dan memahami lingkungan sosial masyarakatnya.

Untuk program Paket, pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dijelaskan bahwa IPS merupakan salah satu matapelajaran yang diberikan mulai dari program Paket A sampai program Paket B. Matapelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat; memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial; memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; dan memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global.

Dalam pembelajaran IPS diperlukan kemampuan guru untuk menggunakan berbagai metode dan strategi pembelajaran. Akbar dan Sriwiyana (2011:xiii-xiv) berpendapat bahwa ada beberapa model pembelajaran yang dipandang sangat cocok untuk pembelajaran IPS, diantaranya adalah model-model rumpun sosial, antara lain investigasi kelompok, bermain peran, jurisprudensial inkuiri, kooperatif, IPS terpadu, *social science inquiry*, dan model pembelajaran yang dibangun berdasarkan pendekatan komprehensif untuk pendidikan nilai dan karakter.

2. Pendidikan Berkarakter

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian peserta didik diberi keleluasaan untuk mengembangkan seluruh potensi dan kemampuan yang dimiliki namun tetap dalam koridor kekuatan spriritual keagamaan, kepribadian, dan akhlak mulia.

Secara umum terdapat sejumlah fungsi dan peranan pendidikan bagi suatu masyarakat. Menurut Wuradji (Idi, 2011:72) pendidikan berfungsi sebagai :

- a. Fungsi sosialisasi
- b. Fungsi kontrol sosial
- c. Fungsi pelestarian budaya masyarakat
- d. Fungsi latihan dan pengembangan tenaga kerja
- e. Fungsi pendidikan dan perubahan sosial
- f. Fungsi reproduksi budaya
- g. Fungsi difusi kultural
- h. Fungsi pendidikan sosial
- i. Fungsi modifikasi sosial

PKBM sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar juga merupakan lembaga yang berperan sebagai agen sosialisasi. Sebagai sebuah agen sosialisasi, nilai-nilai yang

disosialisasikan oleh lembaga penyelenggara pendidikan kepada peserta didik menurut Sunarto (Damsar, 2011:73-74) adalah : (a) nilai kemandirian, (b) nilai prestasi, (c) nilai universalisme, dan (d) nilai spesifik.

Pelaksanaan pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan peserta didik yang cerdas, namun juga berakhlak mulia, berbudi pekerti, dan beragam karakter lainnya. Karakter seperti itu bisa ditanamkan sejak dini, meskipun manusia mempunyai banyak sisi kelemahan. Aristoteles (Lickona, 2013:81) mendefinisikan karakter yang baik sebagai kehidupan dengan melakukan tindakan-tindakan yang benar sehubungan dengan diri seseorang dan orang lain.

Karakter terdiri dari nilai operatif, nilai dalam tindakan. Karakter demikian memiliki tiga bagian yang saling berhubungan, yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral (Lickona, 2013:82). Karakter baru berfungsi dalam lingkungan sosial. Demikian juga dengan sekolah ataupun lembaga pendidikan sejenis jika ingin mengembangkan karakter, lembaga pendidikan harus menyediakan lingkungan moral yang menentukan nilai-nilai yang baik, dan menyimpannya di hadapan hati nurani setiap orang. Memang diperlukan waktu lama bagi sebuah nilai untuk menjadi sebuah kebaikan untuk berkembang dari kesadaran intelektual semata menjadi kebiasaan pribadi untuk berpikir, merasa, dan bertindak yang membuatnya menjadi prioritas yang berfungsi. Menurut Lickona (2013:139) terdapat tiga syarat dasar untuk dapat menciptakan sebuah komunitas yang bermoral di kelas, yaitu : (1) para siswa saling mengenal satu sama lain, (2) para siswa saling menghormati, menguatkan, dan peduli satu sama lain, dan (3) para siswa merasa menjadi bagian dan bertanggung jawab terhadap kelompok mereka.

3. Kelompok Belajar (Kejar), Warga Belajar, dan Tutor Paket B

Dalam pelaksanaan pembelajaran di Paket B setara SMP/ sederajat dikenal adanya istilah kelompok belajar (Kejar), warga belajar, dan tutor. Kelompok belajar (Kejar) merupakan bagian dari pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan dalam program pendidikan nonformal. Pada pasal 1 Ayat 32 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dijelaskan bahwa kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.

Menurut Joesoef (1992:63) kelompok belajar adalah lembaga kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu tergantung pada kebutuhan warga belajar. Warga belajar adalah sebagian dari komunitas binaan atau dari komunitas tetangga, sehingga dengan suatu kesadaran yang tinggi mengikuti satu atau lebih program pembelajaran yang ada (FK PKBM, t.t.,:14-15). Peserta didik program Paket B adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP/MTs melalui jalur pendidikan nonformal.

Kelompok belajar terdiri dari warga masyarakat yang sangat beragam. Para warga belajar di lembaga sekolah sering menunjukkan perbedaan asal etnis, agama, adat istiadat, dan kedudukan sosial. Di dalam pembelajaran orang dewasa, menurut Suprijanto (2012:51-52) ada dua karakteristik peserta didik yang perlu diperhatikan, yaitu : (a) Komposisi peserta didik, meliputi status, umur, latar belakang, jenis kelamin, tingkat pendidikan, cara belajar, dll; (b) Harapan peserta didik, yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dll.

Menurut Sardiman (2011:120) dalam pembicaraan mengenai karakteristik siswa, ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Karakteristik atau keadaan yang berkenaan dengan kemampuan awal atau *prerequisite skills*, seperti misalnya kemampuan intelektual, kemampuan berpikir, mengucapkan hal-hal yang berkaitan dengan

aspek psikomotor, dll.

- b. Karakteristik yang berhubungan dengan latar belakang dan status sosial (*socio cultural*).
- c. Karakteristik yang berkenaan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian, seperti sikap, perasaan, minat, dll.

Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus SD/MI, program Paket A, atau yang sederajat. Tujuan dari program Paket B adalah untuk membekali peserta didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dalam lingkungan kerja. Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia, baik menyangkut persoalan pemerataan maupun peningkatan kualitas pendidikan. Dalam petunjuk teknis program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun nonformal (APBD I) (Paket A setara SD dan Paket B setara SMP) tahun 2012 (Pemprov Kalsel, 2012:1) dijelaskan bahwa Program Paket A setara SD/MI dan Program Paket B setara SMP/MTs merupakan salah satu program unggulan pada jalur Pendidikan Luar Sekolah. Program ini bersifat fleksibel dalam hal waktu pembelajaran dan usia warga belajar, namun fleksibilitas tersebut tidak mengurangi bobot kualitas penyelenggaraan pembelajaran karena titik berat keberhasilan program ini adalah penguasaan kompetensi minimal.

Beragam motivasi yang melatarbelakangi keikutsertaan warga belajar dalam Kejar Paket B. Dalam teori motivasi, Maslow (Sardiman, 2011:81) telah mempopulerkan teori hirarki kebutuhan manusia. Seandainya kebutuhan manusia yang berjenjang ini digambarkan seperti piramida maka terdapat enam lapisan kebutuhan, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk diterima dalam kelompok dan dibutuhkan manusia lain, kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk aktualisasi diri, dan kebutuhan untuk mendapatkan pengetahuan.

Untuk mendukung kelancaran pembelajaran Paket B diperlukan adanya pendidik yang disebut tutor. Menurut FK PKBM (t.t.,:14-15) pendidik/tutor/instruktur/narasumber teknis adalah sebagian dari warga komunitas tersebut atau dari luar yang bertanggung jawab atas proses-proses pembelajaran yang ada. Menurut Rizali, dkk (2009:59) pendidik adalah manusia biasa, karenanya terdapat bermacam-macam cara dan kreativitas dalam melaksanakan tugas dalam mencerdaskan generasi masa depan.

Pembelajaran orang dewasa, menurut Suprijanto (2012:51), ada dua karakteristik pendidik yang harus dipahami, yaitu :

- a. Profesi pendidik
Pendidik sebagai pribadi mempunyai latar belakang, profesi, hobi, pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan tertentu. Semuanya itu akan menentukan sikap sebagai pendidik.
- b. Keadaan pendidik
Keadaan pendidik seperti capek, khawatir, marah, dan bingung akan dapat mempengaruhi aktivitas dalam memberikan bimbingan.

Pemahaman tentang karakteristik warga belajar dan tutor perlu dilakukan, sebab program Kejar Paket B terbuka bagi setiap warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan setingkat SMP/MTs. Dalam program Kejar Paket B warga belajar terdiri dari berbagai tingkatan usia dan status, sehingga PKBM sebagai lembaga pengelola proses pembelajaran perlu memahaminya.

4. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Dalam kehidupan masyarakat dikenal adanya berbagai lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan yang relatif beragam, dan jumlahnya terus bertambah sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat. Menurut Horton dan Hunt (Narwoko dan Suyanto, 2004:196) lembaga sosial adalah suatu sistem norma

untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting. Dari beragam lembaga sosial yang berkembang di dalam masyarakat itu terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bertujuan untuk mengatur pemenuhan kebutuhan warganya, dan terdiri dari seperangkat kaidah serta peranan sosial. Perbedaannya dapat dilihat dari klasifikasi lembaga sosial bersangkutan.

Salah satu lembaga sosial yang muncul seiring dengan dinamika masyarakat adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Pada Pasal 26 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa PKBM merupakan salah satu satuan pendidikan sebagai pelaksanaan pendidikan nonformal. PKBM lahir pada saat krisis sosial ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1998. Salah satu faktor pendorong lahirnya PKBM adalah untuk membantu menangani beberapa masalah yang timbul akibat krisis tersebut, antara lain meningkatnya angka putus sekolah.

Secara umum pendidikan nasional masih dihadapkan pada tiga permasalahan yang menonjol, sebagaimana dinyatakan oleh Depdiknas (2009:2), yaitu meliputi : (a) Masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan; (b) Masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan; dan (c) Masih lemahnya manajemen pendidikan. Pendapat serupa disampaikan oleh Tirtarahardja dan La Sulo (2008:226), yang menyatakan bahwa pada dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air, yaitu :

- a. Masalah pemerataan, yaitu bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan.
- b. Masalah mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan, yaitu bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat.

Keberadaan PKBM didukung oleh beberapa komponen, seperti dinyatakan oleh FK PKBM (t.t.:14-15), yaitu meliputi :

- a. Komunitas binaan/sasaran
- b. Warga belajar
- c. Pendidik/tutor/instruktur/narasumber teknis
- d. Penyelenggara/pengelola
- e. Mitra PKBM

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 105 tentang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Ayat 1 menjelaskan bahwa PKBM dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk :

- a. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan
- b. Memperoleh keterampilan kecakapan hidup
- c. Mengembangkan sikap dan kepribadian profesional
- d. Mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri
- e. Melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Selanjutnya pada Ayat 2 dijelaskan bahwa PKBM dapat menyelenggarakan program kegiatan berupa :

- a. Pendidikan anak usia dini
- b. Pendidikan keaksaraan
- c. Pendidikan kesetaraan
- d. Pendidikan pemberdayaan perempuan
- e. Pendidikan kecakapan hidup
- f. Pendidikan kepemudaan

- g. Pendidikan keterampilan kerja
- h. Pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di PKBM dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

C. Permasalahan Pembelajaran IPS Pada Kelompok Belajar (Kejar) Paket B Di PKBM Barito Banjarmasin

Hasil penelitian yang dilakukan di PKBM Barito pada semester ganjil tahun ajaran 2012-2013 menemukan bahwa :

1. Karakteristik warga belajar dan tutor sangat beragam.

Pada tahun ajaran 2012-2013 PKBM Barito menyelenggarakan satu Kejar Paket B yang diikuti oleh 20 orang warga belajar (18 orang laki-laki dan dua orang perempuan). Usia warga belajar antara 15-37 tahun, dengan status menikah (14 orang) dan belum menikah (enam orang), status belum bekerja dan sudah bekerja (buruh bangunan, tukang kayu, buruh pabrik, karyawan bengkel, karyawan toko sepatu, *cleaning service*, berjualan, guru mengaji).

Dilihat dari tingkat pendidikan, warga belajar yang lulus SD berjumlah 13 orang, lulus MI dua orang, lulus Paket A satu orang, dan *drop out* SMP empat orang. Ada beragam alasan dan motivasi warga belajar mengikuti Kejar Paket B, yaitu dorongan orang tua, dorongan keluarga, ingin menambah pengetahuan, ingin mendapatkan ijazah sederajat SMP. Mereka juga mempunyai beragam keterampilan (bertukang, menyanyi, bermain musik gambus, menyulam, mengaji, membuat kue, otomotif) dan mereka mempunyai beragam harapan setelah lulus Paket B (ingin mendapatkan pekerjaan halal, ingin menjadi guru ngaji, ingin menjadi pedagang, ingin menjadi pegawai kantor, ingin menjadi PNS). Hambatan yang dihadapi yaitu tidak tersedianya buku paket, jadwal belajar yang berbenturan dengan beragam aktivitas warga belajar, minimnya waktu belajar, dan kehadiran tutor sangat kurang.

Tutor matapelajaran IPS ada dua orang, berusia 26 tahun (laki-laki) dan 45 tahun (perempuan), berpendidikan S1 Pendidikan Sosiologi (L) dan Sarjana Pendidikan Islam (P). Tutor laki-laki berstatus sebagai guru honorer dan mengajar matapelajaran IPS sejak tahun 2012, sedangkan tutor perempuan berstatus sebagai pegawai tetap yayasan dan mengajar matapelajaran IPS sejak tahun 2007.

2. Peran lembaga PKBM kurang optimal dalam penyediaan fasilitas dan penunjang pelaksanaan pembelajaran.

Lembaga PKBM kurang berperan dalam rekrutmen warga belajar, justru para tutor yang sangat berperan. Peran PKBM sangat besar dalam rekrutmen tutor dan pembayaran honor tutor, penentuan tempat penyelenggaraan kegiatan Paket B sekaligus menggunakan fasilitas milik sekolah. Pengadaan buku paket, buku tulis, dan alat tulis belum dilakukan oleh PKBM. Sarana penunjang pembelajaran tidak tersedia sama sekali

3. Proses pembelajaran matapelajaran IPS telah diselenggarakan berdasarkan standar proses minimal yang harus dipenuhi.

Proses pembelajaran matapelajaran IPS terkendala oleh minimnya waktu belajar, hanya sekali dalam seminggu dengan waktu 30 menit untuk sekali tatap muka. Jumlah warga belajar yang hadir pada setiap hari pembelajaran juga sedikit, kurang dari 50%. Demikian juga kehadiran tutor hanya mencapai 50% pada setiap

kali pembelajaran. Tutor kurang memperhatikan karakteristik warga belajar yang beragam, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran cenderung memperlakukannya seperti dalam pembelajaran formal yang siswanya lebih homogen.

Untuk persiapan pembelajaran, tutor matapelajaran IPS mengetahui bahwa mereka harus menyiapkan prota, silabus dan RPP, namun dokumen tersebut sulit ditemukan. Ada satu contoh RPP yang didapatkan, dan dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa RPP yang dibuat telah memenuhi kriteria-kriteria yang harus ada.

Untuk pelaksanaan pembelajaran para tutor menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan kerja kelompok. Metode ini digunakan oleh para tutor untuk mensiasati ketiadaan buku paket sebagai sumber belajar bagi warga belajar. Meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas namun semangat belajar dari warga belajar sangat tinggi, suasana pembelajaran menjadi hidup, ada antusiasme, partisipasi, dan kegembiraan warga belajar. Evaluasi pembelajaran dilakukan setiap akhir semester. Soal evaluasi dalam bentuk pilihan ganda yang telah disiapkan oleh dinas pendidikan. Dalam pelaksanaan pembelajaran Paket B Barito pengawasan dari dinas terkait belum dilakukan.

D. Gagasan Pembelajaran IPS Berkarakter Untuk Kelompok Belajar (Kejar) Paket B Di PKBM Barito Kota Banjarmasin

Dari permasalahan yang muncul tersebut penulis mengajukan sebuah gagasan untuk perbaikan pembelajaran di Kejar Paket B Barito, yaitu :

Dengan memperhatikan karakteristik warga belajar yang sangat beragam dari segi usia dan status perkawinan serta status pekerjaan, para tutor bisa mengimplementasikan metode pembelajaran orang dewasa (andragogi) dengan mencoba berbagai bentuk pengalaman belajar sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Model pembelajaran orang dewasa penting untuk dipahami dan diterapkan oleh para tutor agar warga belajar mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan keadaan dan harapan mereka.

Bryson (Suprijanto, 2012:13) menyatakan bahwa pendidikan orang dewasa adalah semua aktivitas pendidikan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam kehidupannya sehari-hari yang hanya menggunakan sebagian waktu dan tenaganya untuk mendapatkan tambahan intelektual. Orang dewasa tidak hanya dilihat dari segi biologis semata. Uno (2009:55-56) mendefinisikan orang dewasa dilihat dari aspek biologis, hukum, sosial, dan psikologi.

Prinsip membelajarkan manusia dewasa berbeda dengan membelajarkan anak yang belum dewasa. Harjatno (1990:4-5) menyatakan bahwa cara membelajarkan manusia dewasa memiliki ciri pendekatan partisipatif, yaitu : (a) berorientasi pada warga belajar, (b) hubungan informal sangat penting, (c) materi program pendidikan dapat langsung dimanfaatkan, dan (d) sumber belajar tidak menggurui warga belajar.

Tough, seperti dikutip Soedomo (Suprijanto, 2012:48-49) menyarankan agar pendidik bersikap ;

- a. Menghargai peserta didik
- b. Menerima gagasan yang mungkin bertentangan dengan harapan yang diinginkan
- c. Harus bekerja dengan latar awal yang menyenangkan
- d. Memberi dorongan peserta didik dalam mengembangkan pribadinya
- e. Mampu mengorganisasikan kelompok belajar
- f. Menanggapi pertanyaan dengan sikap tidak emosional
- g. Meningkatkan partisipasi peserta didik
- h. Empati
- i. Mencerna keterbatasan diri.

Secara khusus tujuan pembelajaran orang dewasa, menurut Uno (2009:61) mencakup tiga aspek yaitu : (a) Membangkitkan semangat percaya diri dan optimisme, (b) Memberikan kemampuan dan keterampilan untuk berbuat sesuatu, dan (c) Memberi kemampuan untuk dapat menerima atau menolak sesuatu atas dasar standar peraturan, nilai-nilai, atau etika masyarakat yang dianutnya. Metode pembelajaran orang dewasa yang sering digunakan antara lain ceramah dan tanya jawab, demonstrasi/praktikum, diskusi kasus dan presentasi, simulasi, permainan, seminar/simposium/lokakarya, studi banding, dll (Uno, 2009:65).

Untuk mengembangkan alternatif pemilihan bentuk pengalaman belajar bagi manusia dewasa, Harjatno (1990:9-10) berpendapat bahwa perlu diperhatikan faktor yang mempengaruhinya, antara lain :

- a. Tujuan pendidikan
- b. Keadaan warga belajar
- c. Keadaan kelompok belajar
- d. Keadaan sumber belajar
- e. Keadaan sarana dan prasarana belajar
- f. Keadaan lingkungan belajar
- g. Alokasi waktu yang disediakan.

Dengan memperhatikan keterampilan yang telah dimiliki oleh warga belajar, lembaga PKBM bisa mencoba mensinergikannya dengan pendidikan kecakapan hidup, karena salah satu nilai yang diajarkan dalam pendidikan bagi orang dewasa adalah nilai kemandirian. Meskipun dengan berbagai keterbatasan, para tutor diharapkan mampu menanamkan nilai optimisme dan percaya diri bagi warga belajar. Penerapan pendidikan kecakapan hidup ini bisa diatasi dengan menjalin kemitraan dengan berbagai instansi, institusi, perusahaan, lembaga kursus, dan lembaga sosial budaya yang mempunyai komitmen untuk mendukung dan mensukseskan pendidikan untuk semua.

Kerjasama juga perlu dilakukan dengan dinas terkait dan lembaga pendidikan formal untuk pengadaan buku-buku paket dan pengadaan media pembelajaran. Kerjasama ini diharapkan dapat menumbuhkan empati dari peserta didik dan guru pendidikan formal terhadap warga belajar dan tutor pendidikan nonformal. Diperlukan juga regulasi yang mempermudah KBM untuk mendapatkan kesempatan menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, karena PKBM berada di tengah-tengah masyarakat dan sifatnya sangat fleksibel.

E. Kesimpulan

Gagasan tersebut sebenarnya telah banyak yang dilakukan oleh para tutor untuk kepentingan pembelajaran Paket B, namun intensitas dan frekuensi perlu ditingkatkan. Bagaimanapun juga para tutor ikut bertanggung jawab dalam mengajarkan pendidikan yang berkarakter bagi para warga belajar yang sangat beragam usia dan statusnya. Melalui matapelajaran IPS diharapkan para tutor memberikan perhatian pada pengembangan nilai, moral, dan sikap kepada warga belajar melalui berbagai metode pembelajaran, termasuk melalui keteladanan dari para tutor. Perubahan karakter tidak bisa terjadi dengan sekejap, namun upaya untuk pendidikan yang berkarakter tetap harus dilakukan di semua jenjang dan program pendidikan.

Daftar Pustaka

- Akbar, Sa'dun dan Sriwiyana, Hadi. 2011. *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial*. Cetakan kedua. Yogyakarta : Cipta Media.
- Banks, J. A. 1990. *Teaching Strategies For The Social Studies: Inquiry, Valuing, and Decision-Making*. New York : Longman.
- Damsar, 2011. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta : Kencana.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2009. *Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP/MTs dan Program Paket C Setara SMA/MA*. Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan.
- Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. *Konsep dan Strategi Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*. Jakarta :FK-PKBM
- Gunawan, Rudy, 2011. *Pendidikan IPS : Filosofi, Konsep, dan Aplikasi*. Bandung : Alfabeta.
- Hamalik, Oemar, 2010. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Cetaka ke-10. Jakarta : Bumi Aksara.
- Harjatno, Tomi, 1990. "Metode Membelajarkan Manusia Dewasa", *Makalah* disampaikan pada Penataran Pelatih Sumber Belajar/Fasilitator Akuntansi. Proyek Pengembangan Pendidikan Akuntansi (P2A) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Oktober.
- Idi, Abdullah, 2011. *Sosiologi Pendidikan: Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Joeseof, Soelaiman. 1992. *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Lickona, Thomas.2013. *Educating for Character: Mendidik Untuk Membentuk Karakter*. Terjemahan. Jakarta : Bumi Aksara.
- Narwoko, Dwi J. dan Suyanto, Bagong (eds). 2004. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta : Kencana.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 2012. *Petunjuk Teknis Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Non Formal (APBD I) (Paket A Setara SD Dan Paket B Setara SMP) Tahun 2012*. Banjarmasin : Dinas Pendidikan Bidang PNFI.
- Rizali, Ahmad, dkk. 2009. *Dari Konvensional Menuju Guru Profesional*. Jakarta : Grasindo.
- Sapriya, 2009. *Pendidikan IPS : Konsep dan Pembelajaran*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sardiman, 2011. *Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Solihatini, Etin dan Raharjo, 2009. *Cooperative Learning: Analisis Model Pembelajaran IPS*. Cetakan ke-4. Jakarta : Bumi Aksara.
- Suprijanto, 2012. *Pendidikan Orang Dewasa : Dari Teori Hingga Aplikasi*. Cetakan keempat. Jakarta : Bumi Aksara.
- Tirtarahardja, Umar dan La Sulo, S.L. 2008. *Pengantar Pendidikan*. Edisi Revisi. Jakarta : Pusat Perbukuan Depdiknas dan Rineka Cipta.
- Uno, Hamzah B. 2009. *Model Pembelajaran : Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan Efektif*. Jakarta : Bumi Aksara.